

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, Tolib, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Jawa Timur.
- Panjaitan, Petrus Irwan, dan Chairijah, 2008, *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, IHC, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soedirjo, Prajudi Atmo, 2002, *Teori Hukum*, Kawan Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zemer, Walter Jacob and Moshe, 1999, *Crime and Punishment In Jewish Law: Essay and Responsa*, Berghahn Books New York.
- Zimring, Franklin E., Gordon Hawkins & Sam Kamin, 2001, *Punishment and Democracy: Three Strikes and You're Out in California*, Oxford University Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 323).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana

dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

C. Artikel Jurnal

Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Maret 2014.

Widyati, Lidya Suryani, “Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan”, *Negara Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2012.

D. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Choerunnisa, Saskia, 2019, *Pelaksanaan Asimilasi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Putri Aprilia, Dinda, 2019, *Pelaksanaan Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Putyanggita, Priaji, 2016, *Pemberian dan Pelaksanaan Asimilasi bagi Narapidana di Kampung Asimilasi Gandul*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

E. Internet

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM, “Sistem Database Pemasyarakatan”,

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/3>,
diakses 15 Maret 2020.

World Health Organization, “Pertanyaan dan Jawaban terkait Coronavirus”,
<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses
17 September 2020.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Kanwil Kemenkumham DIY,
<https://lapassleman.kemenkumham.go.id/>, diakses 4 Oktober 2020.

Kemenkumham DIY, “Selamatkan dari Covid-19, Jajaran Pemasyarakatan
Yogyakarta Keluarkan dan Bebaskan WBP dari Lapas dan Rutan”,
<http://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4557-selamatkan-dari-covid-19-jajaran-pemasyarakatan-yogyakarta-keluarkan-dan-bebaskan-wbp-dari-lapas-dan-rutan>, diakses 4 Oktober 2020.